

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Air merupakan kebutuhan pokok manusia yang semakin langka. Saat ini air sudah menjadi komoditi ekonomi. Sesuai dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004, penyediaan air minum bagi masyarakat menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah melalui pelaksanaan Program Nasional Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi, layanan dan perilaku kesehatan dan sanitasi masyarakat, terutama dalam menurunkan angka kejadian penyakit diare dan penyakit terkait air dan lingkungan lainnya.

Air dan sanitasi merupakan faktor yang terkait dengan perilaku/gaya hidup masyarakat serta turut menentukan tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan seseorang akan mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas kerja, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan. Sektor air minum dan sanitasi merupakan pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Tidak memadainya prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, khususnya di pedesaan dan daerah pinggiran kota (peri-urban) berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga

Ketersediaan air bersih dan sanitasi sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat masih menjadi problematika klasik di negeri ini yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini, dalam upaya mewujudkan Indonesia Sehat. Kedua aspek tersebut memiliki keterkaitan dan membentuk karakteristik lingkungan hidup dalam kawasan permukiman. Kondisi sanitasi yang buruk juga dapat menjadi pemicu pencemaran air dan penyebaran wabah penyakit, seperti diare dan malaria. Dampak berkepanjangan yang mungkin terjadi adalah kematian

Data Kementerian Kesehatan (2020) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 8,6 juta rumah tangga Indonesia yang masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Selain itu, diperkirakan sebanyak 28 juta masyarakat Indonesia juga masih mengalami kekurangan air bersih (Water.org,

2020). Padahal, perilaku BABS dan konsumsi air tidak layak minum dapat menjadi faktor pendorong dalam penurunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karenanya, target penyelesaian permasalahan tersebut tertuang pada tujuan ke enam dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, yaitu “Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.”

Pemerintah Pusat merencanakan Program Nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) sebagai program peyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas). Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah pedesaan dan peri urban agar bisa mengakses pelayanan air minum dan sanitasi (Pamsimas, 2016).

Berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pelayanan air minum dan sanitasi menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah, untuk mendukung kapasitas dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Program Pamsimas III kelanjutan dari program sebelumnya yang sudah terlaksana sejak tahun 2008 sampai saat ini, sebagai instrumen pelaksanaan kedua agenda nasional dalam rangka meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu: 1) air bersih untuk rakyat dan, 2) sanitasi total berbasis masyarakat (Pamsimas, 2016)

Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan akses jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat terlayani perbaikan pelayanan serta fasilitas air minum dan sanitasi serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu komponen dari program Pamsimas adalah komponen peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan layanan higienis dan sanitasi. Tujuan dari komponen kesehatan sendiri adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat serta pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pengembangan cakupan sanitasi melalui pengembangan jamban keluarga dan pembangunan sarana sanitasi di sekolah/tempat ibadah serta memperluas manfaat kesehatan yang dirasakan melalui pengembangan sarana air bersih dan sanitasi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Maka pemerintah mengadakan penyediaan air minum dan sanitasi

berbasis masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat menyediakan air bersih dengan standar higienis.

Secara garis besar permasalahan utama dalam pengelolaan kegiatan penyediaan sarana air minum dan sanitasi yang aman dan layak bagi penduduk desa serta belum tersedianya lembaga yang khusus dalam menangani pengelolaan air minum dan sanitasi di Desa. Dari hal tersebut, Pemerintah Daerah berupaya untuk meminimalisir dari permasalahan lingkungan yang kurang sehat dan menurunkan angka penderita penyakit yang di timbulkan oleh air. Tercapainya tujuan kebijakan pengelolaan air minum dan sanitasi yang sehat yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari evaluasi kebijakan.

Permasalahan secara khusus di Desa Ambara adalah masyarakat Desa Ambara belum memiliki kesiapan secara optimal dalam pelaksanaan program pembangunan sanitasi dan air bersih. Terbukti dari kondisi fasilitas penyediaan air bersih yang kurang terpelihara dengan baik dan masih banyak ditemukan masyarakat yang membuang hajat baik dikebun maupun disungai tanpa ada rasa takut tercemar bau maupun penyakit. Hasil pengamatan penulis bahwa hingga saat ini, terdapat satu dusun yang bisa mendapatkan air bersih yakni dusun harapan 1, sementara 3 dusun lainnya belum tersentuh dengan program ini sehingga perlu dilakukan perbaikan dan peninjauan kembali

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin menggali informasi tentang permasalahan di atas dengan judul penelitian “Evaluasi Program Pembangunan Sanitasi Dan Air Bersih Di Desa Ambara Kec Dungaliyo Kabupaten Gorontalo”

1.2 Identifikasi Masalah

1. ketidaksiapan masyarakat ambara memelihara fasilitas sanitasi dan air bersih, hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat dalam membayar iuran bulanan sebesar Rp 5000, sangat rendah
2. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga belum mampu menjangkau semua dusun

1.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus permasalahan yang akan di jawab dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Evaluasi Program Pembangunan Sanitasi Dan Air Bersih Di Desa Ambara Kec Dungaliyo Kabupaten Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan fokus permasalahan yaitu untuk mencari tau tentang sejauh mana pelaksanaan Program Pembangunan Sanitasi Dan Air Bersih Di Desa Ambara Kec Dungaliyo Kabupaten Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya khususnya terkait dengan masalah Program Pembangunan Sanitasi Dan Air Bersih

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah terkait dengan Program Pembangunan Sanitasi Dan Air Bersih Di Desa Ambara Kec Dungaliyo